



**KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG**  
**NOMOR : 503/02/TK/NP**

**TENTANG**  
**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK)**  
**KUMARA SANTI**

**BUPATI KLUNGKUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan saran/pertimbangan dan Rekomendasi Tim Teknis dan Koordinasi Pelaksana Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung dapat menerima/diterbitkan Ijin Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) KUMARA SANTI atas permohonan bertindak untuk dan atas nama NYOMAN SUKARIANING dengan alamat Br Bayuh Desa Kutampi Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.
  - b. Bahwa saran/pertimbangan dan Rekomendasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Klungkung tentang Ijin (TK) KUMARA SANTI

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 );



5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 691, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 148 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perijinan Atas Nama Kepala Daerah Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung;



Kepada Camat dan Penyelenggaraan Tugas – tugas Umum Pemerintahan .

15. Peraturan Bupati Klungkung Nomor : 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 Tantang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Kecamatan.
16. Keputusan Camat Nusa Penida Nomor 09 Tahun 2020 tentang pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Terppadu Kecamatan ( PATEN ) di Kecamatan Nusa Penida.

Menetapkan :

**MEMUTUSKAN :**

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)

kepada :

NAMA LEMBAGA : PAUD KUMARA SANTI

LAYANAN PROGRAM : 1.Taman Kanak – Kanak (TK )  
2.Kelompok Bermain ( KB )

KEDUA :

ALAMAT : Br.Ponjok Desa Kutampi Kec.  
Nusa Penida, Kabupaten  
Klungkung

KETIGA :

Penanggung jawab Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) KUMARA SANTI wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 3 ( tiga ) bulan kepada Bupati Klungkung/Cq Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klungkung.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan diberlakukannya keputusan Bupati Klungkung dengan nomor 503/02/TK/NP/,maka keputusan Bupati Klungkung dengan nomor 503/01/TK/NP tidak berlaku lagi. apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan akan diadakan peninjauan Kembali sebagaimana Mestinya.

Nusa Penida, 3 April 2020

a.n.BUPATI KLUNGKUNG

Camat Nusa Penida

I Komang Widyasa Putra, SSTP., MAP.

NIP.19820307 200112 1 004

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pembinaan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Jakarta.
3. Gubernur Bali di Denpasar.
4. Ketua DPRD. Propinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga Propinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klungkung di Semarapura.
7. Kabag Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung di Semarapura.
8. Arsip.